BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial. Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat.¹

Untuk memajukan atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan untuk mensejahterakan rakyat, yang merupakan pendorong untuk membiayai pembangunan dari berbagai sudut dan itu merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Dengan begitu pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut yakni usaha pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan

¹ lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006 Dalam Skripsi Sri Susilowati *pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dikantor pelayanan pajak pratama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pengelola pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan*, Universitas Sebelas Maret : Surakarta Hal. 1

kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan pajak bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan distor sepenuhnya ke rekening Kas Negara.²

Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak.³

² Mardiasmo (2009): *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi hal 337

³ Soparmoko(.2008). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta Hal 195.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dengan adanya pengalihan PBB- P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota).⁴

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

⁴ lihat Licia silveria Tapitipulu 2015, *pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebagai pajak daerah dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi Pada pemerintah kota manado* Universitas Saratulangi : Manado Hal.464

Di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pelayanan publik di bidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan maksimal. Ini dikarenakan faktor pemimpin yang kurang memperhatikan para pekerja atau para kariawan/ pegawai yang mana perilaku pegawai di kecamatan dalam melayani keluhan masyarakat tidak di respon dengan baik. Ini juga berdampak pada faktor keahlian pegawainya dalam hal ini pegawainya belum menguasai pengoperasian computer, sehingga prestasi kerja di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, masih sangat rendah atau masih di bawah standar

Di Kecamatan Parigi pajak bumi dan bangunan saat ini masih jauh dari harapan yang mana partisipasi masyarakat dalam membangun pajak bumi dan bangunan ini masih sangat kurang, sehingga kelancaran pembangunan semakin jauh ketinggalan. Hal itu disebabkan pengelolaan dan penanganan perpajakan belum begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan dalam mengurus pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dikatakan belum maksimal dikarenakan masalah pegawai dalam hal ini aparatur pemerintah kecamatan lambat dalam pelayanan dan sebagian pegawai belum menguasai dalam hal pengoperasian komputer dan fasilitas pelayanan masih kurang serta sebagainya adalah merupakan fenomena-fenomena yang kerap kali mewarnai proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan pelayanan. Ketika pelayanan pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan baik maka akan

berdampak terhadap pembangunan .

Pajak bumi dan bangunan ini seharusnya dilakukan penagihan selama satu bulan, akan tetapi tidak berjalan dengan maksimal. Faktor lain juga karena kurangnya sosialisasi aparat pemerintah kecamatan Parigi, yang mana perpajakan yang seharusnya aparat pemerintah kecamatan saling berkomunikasi dengan aparat pemerintah Desa demi kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan, akan tetapi ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan kondisi tersebut dapat terimplementasikan dengan baik jika setiap pegawai memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas

Pajak bumi dan bangunan ini seharusnya tidak dibiarkan seperti itu terus menerus karena apabila dibiarkan seperti itu kemajuan pembangunan khususnya di Kecamatan Parigi akan mengalami keterpurukan dalam segi pembangunan untuk memajukan desa- desa yang ada di kecamatan Parigi tersebut. Pelayanan pemerintah seharusnya memberi kenyamanan agar masyarakat memberikan respon balik mengenai pajak bumi dan bangunan dengan membayar pajak sesuai dengan apa yang dimilikinya.

Ketika masyarakat sudah tidak peduli lagi akan masalah perpajakan maka bagi pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang sifatnya untuk menarik masyarakat kembali berpikir kedepan. Serta pemerintah seharusnya memberikan gambaran apa yang akan terjadi apa bila masyarakat mengeyampingkan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di formulasikan dengan judul *“Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di bidang pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik dibidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan,di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Faktor- faktor apakah yang menghambat kinerja sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik di bidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik di bidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan PBB di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan Publik dibidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan PBB di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dalam pelayanan publik di bidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan PBB di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kinerja sumber daya aparatur pada pelayanan publik di bidang kepengurusan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tersebut :

1. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat tentang permasalahan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Bidang Kepengurusan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini di adakan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Bidang Kepengurusn Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.